

No. 1-2 Th. X/Nopember 2004
ISSN 085-4-9559

BANDAR MAULANA

JURNAL SEJARAH UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Negara-Negara Sedang Berkembang:
Dari Ekspor Bahan Mentah Hingga Ekspor
Produk Manufaktur

Anton Haryono

Demokrasi, Civil Society, dan Kapitalisme Global
Pasca Perang Dingin

Budiawan

Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks
Ketahanan Nasional: Tinjauan Kebijakan/Operasional

G. Moedjanto

Sepenggal Catatan Kusam

Sastro Sukamiskin

**CUPLIKAN HASIL WAWANCARA
DENGAN BEKAS ROMUSHA**

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Negara-Negara Sedang Berkembang: Dari Ekspor Bahan Mentah Hingga Ekspor Produk Manufaktur Anton Haryono	1
Demokrasi, <i>Civil Society</i> , dan Kapitalisme Global Pasca- Perang Dingin Budiawan	25
Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Konteks Ketahanan Nasional: Tinjauan Kebijakan/ Operasional G. Moedjanto	33
Sepenggal Catatan Kusam Sastro Sukamiskin	53
Cuplikan Hasil Wawancara dengan Bekas Romusha	63

SEPENGGAL CATATAN KUSAM

Sastro Sukamiskin

Sebuah episode sejarah hubungan antar umat beragama di Indonesia telah terjadi di awal bulan Oktober 2004. Sekelompok umat muslim mendatangi Sekolah Katolik Sang Timur di Ciledug. Mereka mengajukan tuntutan agar sekolah tersebut tidak lagi digunakan sebagai tempat upacara peribadatan umat Katolik. Meski berakhir dengan “kesepakatan dalam keterpaksaan”, namun kepiluan begitu terasa di hati umat Katolik. Seorang Pastur memaknai peristiwa tersebut sebagai:

Kezaliman terhadap peribadatan minoritas sudah melampaui batas dan mengancam, membuat percuma usaha tulus banyak pihak di agama mayoritas maupun agama-agama minoritas untuk membangun hubungan yang toleran. (Franz Magnis Suseno, 2004)

Perasaan sakit hati, marah dan geram dapat dimaklumi, karena Ciledug bukanlah satu satunya dan semuanya ber-akhir dengan tanpa penyelesaian hukum yang memuaskan:

Dua bulan lalu Bupati Bandung per surat serentak menutup 12 tempat ibadah serupa di Bandung. Kekerasan terhadap gereja-gereja berjalan terus, dengan rata-rata satu kejadian per minggu. (Franz Magnis Suseno, 2004)

Fanatisme

Bagai sebuah gunung es (*ice berg*), letupan-letupan konflik antar pemeluk agama yang semakin lama semakin sering terjadi, mengindikasikan betapa besar dan kompleks permasalahan yang sebenarnya berlangsung di bawah permukaan. Agama yang katanya memiliki kekuatan transformatif ampuh untuk menyelamatkan bumi dengan memperbaiki akhlak manusia, dalam kenyataannya di berbagai sisi kehidupan justru menebarkan kesengsaraan. Yang cukup memprihatinkan adalah bahwa konflik agama yang selama ini terjadi terutama antara Islam dengan Katolik dan Protestan yang notabene berasal dari satu “kampoeng” sebuah negeri nun jauh di sana. Dan yang sungguh memilukan adalah konflik itu terjadi justru di negeri

Indonesia tercinta yang masyarakatnya secara genealogis bukan anak cucu Ismail maupun Iskak.

Tidak mudah mencari penyebab yang mampu menjelaskan semua konflik agama di tanah air. Permasalahan sudah begitu ruwet dan tali temali dengan berbagai peristiwa di masa lampau. Dalam penjelasan resmi biasanya dikatakan bahwa penyebabnya adalah adanya pihak-pihak tertentu yang menjadikan agama sebagai kendaraan kepentingan pribadi dan kelompok sembari bersembunyi di balik kata "oknum provokator". Tidak jarang juga dimunculkan jawab-an bernuansa akademis tentang adanya kecemburuan sosial ekonomi kelompok masyarakat pemeluk agama yang satu terhadap pemeluk agama lainnya.

Meski sensitif untuk diperbincangkan, ada faktor ideologis yang sulit dipungkiri ikut mendorong terjadinya konflik, yaitu militansi dan fanatisme agama. Keyakinan sebagai satu-satunya pembawa kebenaran Tuhan yang final, menjadikan militansi dan fanatisme merupakan kekuatan potensial yang di satu sisi mampu mendorong terjadinya penyebaran agama entah dengan judul missi, zending ataupun dakwah.

... sifat umum dari agama resmi adalah mengajarkan dakwah (misionaris). Agama-agama resmi biasanya cenderung lebih banyak mengembangkan misionaris, kecuali Yahudi. Islam dan Kristen adalah agama dakwah, yang dituntut kepada kaumnya untuk menyebarkan agamanya. Itu sebabnya, eksistensi agama resmi sangat ditentukan dari bagaimana dakwahnya bisa mempengaruhi umat. (*Suara Pembaruan Daily*, 6/9/2002)

Di sisi lain fanatisme melahirkan pandangan bahwa kebenaran lain sebagai salah, jahat dan sumber bencana, sehingga warga pemeluk agama dan keperayaan lain perlu dikikis habis atau paling sedikit dicegah perkembangan jumlahnya.

... agama resmi sering kali mengalami benturan dan konflik yang berkepanjangan. Hal itu disebabkan, agama-agama resmi sering kali mempersempit universalitas ajaran Tuhan sehingga yang muncul adalah klaim kebenaran yang bisa berujung pada sikap fanatisme, militan, dan radikal. (Khamami pada *Suara Pembaruan Daily*, 6/9/2002)

Keberhasilan mengikis habis kelompok lain dimaknai sebagai kesuksesan yang mendatangkan tidak hanya kebahagiaan kehidupan duniawi, tetapi juga diyakini menjadi "tiket VIP"

untuk masuk ke kebahagiaan surgawi yang abadi.

Dominasi Agama Pendetang di Indonesia

Militansi dan fanatisme itu pula yang membawa berbagai agama pendatang masuk di Indonesia. Dalam sejarah dapat disimak betapa agama Hindu, Budha, Islam, Kristen dan Katolik berusaha keras untuk menancapkan pengaruhnya di nusantara. Perlahan tetapi pasti, "agama asli" Indonesia menjadi bagai tidak berhak untuk hidup dan berkembang di tanah tumpah darahnya sendiri. Seakan telah merupakan dalil umum bahwa memang sudah layak dan sepantasnya "agama asli" dikalahkan dan dipinggirkan oleh agama-agama pendatang. Bahkan Pancasila sebagai falsafah bangsa yang oleh Soekarno dikatakan kalau diperas jadi satu adalah GOTONG ROYONG, (Lihat pidato Soekarno pada 1 Juni 1945) akhir-akhir ini sangat terasa secara sengaja digeser menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peminggiran "agama asli" menjadikan bangsa Indonesia setahap demi setahap kehilangan identitasnya. Hilangnya identitas kultural tersebut antara lain dirasakan oleh dunia akademik pada sulitnya menemukan "the origin" dalam ke-budayaan Indonesia dewasa ini. Berbagai penelitian yang di-lakukan, menjadi bagai penyelaman di laut tak berdasar. Bahkan tidak sedikit pihak yang sembari diliputi rasa frustrasi menyangsikan kegunaan penelitian tentang "agama asli" Indonesia.

Keterpinggiran "agama asli" sampai ke titik yang sungguh memprihatinkan ketika dengan sengaja pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk tidak mengakui "agama asli" Indonesia sebagai agama resmi. Alasannya karena syarat untuk disebut agama adalah menyembah Tuhan, memiliki nabi, kitab dan mengandung aturan serta sanksi moral beru-pa surga atau neraka. Dari semua syarat tersebut, tampaknya tak satupun dapat dipenuhi oleh "agama asli" Indonesia. Barangkali akan lebih netral apabila dinyatakan bahwa dalam "agama asli" tidak ada pemujaan terhadap Tuhan seperti yang dipahami oleh agama-agama pendatang, khususnya agama samawi. Ketidadaan upacara

penyembahan Tuhan bukan berarti tidak ada pengakuan terhadap eksistensi-Nya, tetapi lebih karena kepercayaan terhadap kesangatsempurnaan mekanisme semesta. Masyarakat Indonesia sangat percaya bahwa semesta ini tercipta dalam keadaan sangat sempurna: matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat, bulan dan bintang bermunculan di malam hari serta musim silih berganti. Semuanya berjalan sendiri-sendiri, tetapi dalam sebuah keteraturan yang disebut hukum alam.

Dari kosa kata kultural lokal, tidak ditemukan tokoh yang difigurkan sebagai Sang Pencipta. Jibata, danyang, cikal bakal, tuyul, gendruwo, buto ijo, wewe dan bahkan bhataras yang dianggap gaib tertinggi oleh masyarakat Philipina, tidak ditempatkan sebagai Sang Pencipta semesta. Figur Sang Pencipta dalam khasanah "agama asli" Indonesia, barangkali lebih dapat disejajarkan dengan figur Tao pada masyarakat Cina pra Budha yang melakukan tidak suatu apa-pun atau *wu wei* terhadap mekanisme semesta. Dari sudut pandang ini, Sang Pencipta sedikit banyak dapat digambarkan sebagai zat Maha Sempurna yang tidak pernah men-campuri, meminta dan menuntut sesuatupun dari semesta.

Agama lokal atau meminjam EB Taylor, agama dasar adalah agama yang sederhana dan dianut oleh bangsa manusia. Agama ini terdiri atas kepercayaan pada Tuhan sang Pencipta yang menjadikan dunia dan kemudian menyerahkannya pada hukum-hukum dasarnya sendiri. (Khamami, pada *Suara Pembaruan Daily*, 6/9/2002)

Pandangan akan kesangatsempurnaan semesta kiranya juga dapat menjelaskan ketidakbutuhan "agama asli" terhadap figur tokoh penyelamat seperti nabi, rosul, kitab suci dan juga pengadilan terakhir. Prinsip "Biarlah waktu menyelesaikan" dan "*Becik ketitik ala ketara*" merupakan contoh ekspresi yang kiranya dapat mewakili akan kepercayaan asli terhadap kesangatsempurnaan mekanisme alam dalam menyelesaikan semua masalah di luar kemampuan individu manusia. Hal ini berbeda dengan konsep dosa asal, jahiliah atau *Civitas Terena* yang menjadikan kehadiran Tuhan, Nabi dan Kitab Suci sebagai sebuah keharusan.

Perbedaan antara "agama asli" dengan agama-agama pendatang akan menjadi bunga-bunga kehidupan yang indah apabila semua pihak bersedia untuk hidup berdampingan secara damai dengan memaknai setiap kebenaran sebagai sangat relatif dan berakhir pada konsep "kecocokan" serta "jodoh" masing-masing individu. Seseorang mungkin merasa cocok dengan ajaran Islam, tetapi orang lain barangkali lebih merasa *jodho* dengan Katolik. Masing-masing sudah seharusnya menghargai hak perorangan untuk secara merdeka memilih dan mengubah pilihannya, meski seandainya pilihan itu jatuh pada tidak beragama.

Akan tetapi, dalam kenyataannya kemerdekaan dalam bingkai persaudaraan masih sekedar impian. Berbagai aturan secara sengaja menempatkan "agama asli" pada gelapnya keterpinggiran di negerinya sendiri, bahkan dalam hal perkawinan:

Asep Setia Pujanegara (32), misalnya, terpaksa menggugat Badan Koordinasi Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia menggugat penolakan lembaga itu mencatat perkawinannya dengan Rela Susanti. Mereka menikah secara adat Sunda, 23 Agustus 2001. Penolakan itu menyusul sikap Asep yang menolak mengisi kolom agama di kartu tanda penduduknya. Pengisian kolom agama itu merupakan syarat mencatatkan perkawinan. Meskipun kalah dalam persidangan, Maret 2002, Asep dan istrinya memutuskan naik banding. (*Suara Pembaruan Daily* 10/1/2003)

Pertanyaan yang mungkin dianggap nakal adalah dari mana datangnya kekuatan kolonialistis yang menekan pemerintah Indonesia sampai bersedia membuat aturan yang menyingkirkan "agama asli" masyarakatnya?

Dualisme

Salah satu peristiwa traumatis bagi "agama asli" terjadi pada awal masa kekuasaan Orde Baru, dimana semua orang Indonesia yang "tidak beragama" dipaksa masuk ke organisasi agama-agama pendatang yang diakui pemerintah. Tekanan secara struktural terhadap keberterimaan pribumi, memaksa rakyat kecil untuk memasuki organisasi keagamaan resmi tertentu dengan alasan agar dapat terhindar dari cap sebagai komunis, atheis

ataupun keruwetan birokrasi lain. Huru hara pada awal Orde Baru tersebut melahirkan fenomena unik dalam kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia yang dikenal sebagai berkembangnya agama rakyat. Meskipun secara formal memeluk agama pendatang tertentu, dalam kehidupan sehari-hari rakyat pedesaan melaksanakan berbagai ritual yang sama sekali tidak diajarkan oleh agama. Bahkan tidak jarang ritual rakyat kecil itu bertentangan dengan ajaran agama pendatang yang dican-tumkan pada KTP. Misalnya, meski di KTP tertulis beragama Islam, tetapi menjalankan puasa *ngebleng* 3 hari menjelang Jumat Kliwon yang diakhiri dengan semedi *kungkum* (berendam) di sungai tertentu. Atau meski secara resmi beragama Katolik, tetapi menjalankan ritual yang ditujukan kepada Nyai Loro Kidul dan dirumahnya mengkoleksi benda-benda keramat. Ungkapan agama sebagai *ageman* yang terdapat pada masyarakat Jawa dapat dipahami sebagai sindiran untuk para elit agama pendatang bahwa tekanan yang mereka lakukan adalah sebuah kesia-siaan. Tekanan itu hanya dapat mempengaruhi bentuk luar (*baju/ageman*), tetapi tak akan menyentuh hati nurani (keyakinan). Agama ditempatkan bukan sebagai masalah batiniah, tetapi sekedar masalah sosial-pemerintahan dan bahkan ekonomi.

Agama rakyat sebagai solusi *wong cilik* terhadap tekanan pemuka agama pendatang yang berkolaborasi penguasa politik, melahirkan kepribadian masyarakat yang terbelah. Satu kakinya bersujud menurut dogma-dogma agama formal yang "dipaksakan" penguasa dan pemimpin agama pendatang, sedang kakinya yang sebelah bersujud pada bangun tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Keterbelahan tersebut mengakibatkan produk budayanyapun bersifat dualistis. Di bidang politik, fenomena dualisme dapat dilihat dari praktek demokrasi Indonesia yang oleh Gus Dur dikatakan sebagai demokrasi seolah-olah. (Tempo, No. 12, 1991) Seolah-olah berpemerintahan demokratis, tetapi prakteknya kental dengan otoritarianisme. Di bidang ekonomi, fenomena dualisme dapat disimak dari berkembangnya kapitalisme semu, yaitu lahirnya

kelas konglomerat yang dibesarkan bukan oleh kerja keras dan efisiensi, tetapi oleh koneksi dan kolusi dengan pejabat pemerintahan. Di bidang persekolahanpun dualisme terlihat dari eksistensi ilmu pengetahuan yang seharusnya merupakan jalan pencarian kebenaran akan mekanisme semesta, justru disikapi sebagai bahan hapalan.

Berkembangnya kesemuan menjadikan dewasa ini berbagai masalah bangsa tak dapat tertangani dengan semestinya. Banyaknya solusi yang dicobakan tampaknya tidak akan mampu mengatasi masalah bangsa Indonesia secara tuntas tanpa dengan mengakhiri dualisme kebudayaan. Salah satu jalan yang mungkin ditempuh adalah pemberian kemerdekaan sepenuhnya dalam keberagaman. Seorang aktifis interfidei mengemukakan permasalahan terhadap kemungkinan rekonsiliasi antara agama-agama pendatang yang di Indonesia ditempatkan sebagai agama resmi dengan "agama asli".

Rekonsiliasi dalam hal ini adalah bagaimana agama-agama resmi itu secara formal mengakui kesalahan dan meminta maaf atas keterlibatan mereka di masa lalu. Dalam banyak hal, ada semacam ketakutan jika ini dilakukan akan mengakibatkan pergolakan sosial baru. Ada ketakutan, jika ini dikemukakan akan berakibat pada situasi kontra produktif di tengah-tengah iklim dialog yang mulai kondusif. Paling krusial, ada semacam ketakutan jika ini terjadi, akan ada banyak orang-orang yang dulunya terpaksa melebur dalam agama resmi itu kembali lagi ke keyakinan mereka semula.

Kembalinya orang-orang yang dulu terpaksa melebur itu akan berdampak pada merosotnya jumlah penganut agama resmi secara tajam dan pada saat yang sama struktur sosial dan peranan politik agama-agama resmi itu semakin bergeser, baik secara internal maupun eksternal. Orang-orang keturunan Tionghoa, misalnya, barangkali mereka akan lebih senang menjadi penganut Kong Hu Cu daripada memilih satu di antara lima agama resmi itu. Orang-orang kejawaen barangkali akan lebih senang menjadi sebagaimana mereka dulu daripada menganut Islam, Katolik, Kristen, Hindu atau Budha. Tampaknya, kedua alasan itu masih menjadi kekhawatiran agama-agama resmi dan mendorong mereka untuk hati-hati dalam melaksanakan program-program rekonsiliasinya. (Akhdad Fikri AF)

Kekhawatiran akan hilangnya pengikut dan juga masih kuatnya fanatisme menjadikan gagasan rekonsiliasi tak pernah

memiliki kekuatan politik nyata. “Memperkuat pendidikan pada agama penganut” justru ditempatkan sebagai agenda utama. Pendisiplinan untuk sepenuhnya mengikuti nilai dan norma agama-agama penganut itu terasa semakin kuat sejak tahun 1990-an. Pada tahun 1996 melalui Departemen Pendidikan, dilakukan penataran peningkatan keimanan dan ketaqwaan bagi guru-guru SMA Negeri di Yogyakarta. Penataran itu diadakan dengan tujuan:

untuk mencapai kesatuan persepsi dan gerak langkah segenap pengelola pendidikan dalam upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi siswa ... Untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi siswa sekolah menengah umum dan kejuruan perlu adanya kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terpadu-antar berbagai mata pelajaran dengan agama Islam dan saling menunjang. (Depdikbud, DIY, 1996)

Langkah tersebut membawa konsekuensi akan semakin hilangnya identitas kultural bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bukan hanya keterbelahan yang bakal terjadi, tetapi kelingsingan budaya. Dari sudut pandang ini, secara tidak langsung tekanan terhadap “agama asli” Indonesia hanya akan mengulangi apa yang oleh interfaith disebut sebagai kesalahan masa lampau.

Membangkitkan Agama Asli

Salah satu jalan untuk mengakhiri dualisme budaya dalam masyarakat Indonesia adalah dengan membangkitkan kembali kearifan “agama asli”. Menemukan dan menghidupkan kembali “agama asli” merupakan langkah yang sungguh penting bagi masa depan bersama sebagai bangsa.

... mendapatkan kembali spirit agama yang asli ini dan hidup dengannya dalam kedamaian dan ketenangan berdasarkan persaudaraan universal dalam semua umat; Kristen, Islam, Yahudi, dan yang lainnya di bawah Tuhan sang Pencipta yang tunggal. (*Suara Pembaruan Daily*, 6/9/2002)

Dari khasanah sejarah dunia, dapat disaksikan bahwa melalui pengembangan “agama asli”, berbagai bangsa dapat tumbuh menjadi yang terdepan. Keunggulan Barat diantara bangsa-bangsa di dunia dewasa ini, dapat terjadi hanya melalui proses menemukan “agama asli” yang dikenal dalam sejarah sebagai

renaissance. Peradaban Yunani dan Romawi menjadikan bangsa Eropa bagai anak ayam yang menemukan induknya:

It is because the Greeks were the first people in ancient times who thought and acted much like us. True sons of Japheth, they displayed a keen intellectual curiosity, which led to speculation on almost every subject. They also had a strong individualistic spirit, and would not accept any law, rule or fact just because somebody “said so.” Those two characteristics paved the way for the Greeks to depart from the patterns of all those that preceded them. Finally, they were the first people on record who saw humanity in a positive light. Whereas the Bible teaches us that man has fallen and can only recover with God’s grace, and most of the world’s mythologies claimed that man was created to serve the gods, the Greeks thought that man left on his own was generally good, and that under the right circumstances he could rise to challenge the gods...

Without the ancient Greeks, we might never even have conceived of self-government. But still more important than our language, our laws, our logic ... our standards of truth and beauty ... we owe to them a deep sense of the dignity of man. From them, we learned to aspire without limit, to be, as Aristotle suggested, ‘immortal as far as we can. (Charles Kimball pada <http://www.xenohistorian.faithweb.com/europe/eu02a.html>)

Begitu pula yang dialami oleh Jepang. Gerakan kembali ke “agama asli” yang mengemuka dengan nama *kokugaku* (ilmu tentang kebudayaan asli) yang berinti pada pencarian jati diri bangsa Jepang. (Ryosuke-Ishii, 1988, 104-105).

Kokugaku ‘National (i.e. Japanese) Learning’ refers to an intellectual trend which rejected the study of Chinese and Buddhist texts and favored philological research into the early Japanese classics. The findings of kokugaku scholars inspired a popular movement for the restoration of a Japanese ‘golden age’, paved the way for the return of imperial rule, and have underpinned the development of Japanese nationalism in the nineteenth and twentieth centuries. The main teachings of kokugaku, as popularly understood, were that Japan and the Japanese people constitute a distinctive national entity (kokutai) marked by spontaneity, natural goodness and innate divinity. These unique characteristics are revealed in early Japanese works such as the Kojiki, Nihongi and Man’yoshu which predate the foreign and polluting influences of Buddhism and Chinese thought (<http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedic/shinto/koku.html>)

Gerakan tersebut menjadi langkah penting yang kemudian mendorong terjadinya Restorasi Meiji dan menghantar Jepang sebagai salah satu negara *super power*.

Dari sudut pandang ini, impian para bapa pendiri bangsa untuk

mewujudkan Indonesia Raya kiranya juga hanya akan tercapai apabila "agama asli" dapat dibangkitkan lagi. Selain itu, dari dua fenomena dalam sejarah dunia tersebut juga dapat diambil pemahaman bahwa kesadaran kaum intelektual menjadi kunci bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan kebangkitan "agama asli".

SUMBER

Akhmad Fikri AF, *Signifikansi Sosial Kelompok Interfaith: Sebuah catatan dari pertemuan refleksi jaringan interfaith*. http://www.geocities.com/forlog/malino_inter-fidei2.htm juga dapat disimak pada <http://www.mu-dika.com/inspirasi/wmprint.php?InspID=26>

Depdikbud, DIY, 1996, *Pedoman Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Siswa SLTA*.

Franz Magnis Suseno, "Tidak Dapat Dijerat Hukum" yang terdapat pada *Warta Kampus* No 19, tahun 2004.

Khamami Zad, "Mempertimbangkan Spirit Agama Lokal" pada *Suara Pembaharuan Daily*, 6/9/2002

Ryosuke Ishii, 1988, *Sejarah Institusi Politik Jepang*. Terjemahan. (Jakarta: Gramedia)

Tempo No. 12, Tahun 1991.

<http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/shinto/koku.html>

<http://www.xenohistorian.faithweb.com/europe/eu02a.html>